

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN
AUDITED**

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TA. 2023**



***Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
018.09.567364 KD***

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Jalan Raya Karangploso KM. 4 Malang, Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Malang, 31 Desember 2023
Kepala BPSIP Jawa Timur



Dr. Atekan, SP, Msi
NIP. 197210061999031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3 Basis Akuntansi

A.4 Dasar Pengukuran

A.5 Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Pendapatan

B.1.2 Penerimaan Pajak

B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja

B.2.1 Belanja Pegawai

B.2.2 Belanja Barang

B.2.3 Belanja Modal

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

C.7 Piutang Bukan Pajak

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

- C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
 - C.13 Persediaan
 - C.14 Persediaan yang Belum Diregister
 - C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
 - C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya
 - C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
 - C.19 Tanah
 - C.20 Tanah Belum Diregister
 - C.21 Peralatan dan Mesin
 - C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
 - C.23 Gedung dan Bangunan
 - C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
 - C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
 - C.27 Aset Tetap Lainnya
 - C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister
 - C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
 - C.32 Aset Tak Berwujud
 - C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
 - C.34 Aset Lain-lain
 - C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister
 - C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
 - C.37 Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
 - C.39 Hibah Yang Belum Disahkan
 - C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
 - C.41 Pendapatan Diterima Dimuka
 - C.42 Uang Muka dari KPPN
 - C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya
 - C.44 Ekuitas
 - C.45 Catatan Penting Lainnya neraca
- D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
- D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
 - D.8 Beban Bantuan Sosial
 - D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

- D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
- D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
- D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
- D.14 Pos Luar Biasa
- D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

- E.1 Ekuitas Awal
- E.2 Surplus (Defisit) LO
- E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
- E.5 Transaksi Antar Entitas
- E.6 Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas

VI. Lampiran dan Daftar

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Malang, 31 Desember 2023

Kepala BPSIP Jawa Timur



Dr. Atekan, SP, Msi

NIP. 197210061999031001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp431.743.259 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp431.743.259 atau mencapai 106,32 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp406.091.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.259.313.423 atau mencapai 96,80 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.797.301.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp475,164,750,482 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp72,794,132; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp7,646,973; Aset Tetap (neto) sebesar Rp475,069,807,377 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp14,502,000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp475,164,750,482

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp384,978,160 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp18,774,788,137 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp - 18,389,809,977, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp334.444.999 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-18,055,364,978.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp477.386.575.296, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-18,055,364,978 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 5.970.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 15.827.570.164 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp475,164,750,482

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR 567364

Tgl Data : 10/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 10/05/24 10:52 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	406,091,000	431,743,259	25,652,259	106	730,269,000	920,162,963	189,893,963	120
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	406,091,000	431,743,259	25,652,259	106	730,269,000	920,162,963	189,893,963	120
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	406,091,000	431,743,259	25,652,259	106	730,269,000	920,162,963	189,893,963	120
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	16,797,301,000	16,259,313,423	(537,987,577)	97	15,769,675,000	13,917,895,842	(1,871,779,158)	88
1. Belanja Pegawai	6,113,025,000	6,016,579,056	(94,445,944)	98	9,345,600,000	6,043,627,950	(3,301,972,050)	65
2. Belanja Barang	10,136,276,000	9,692,924,287	(443,351,713)	96	6,419,075,000	5,053,255,392	(1,365,819,608)	79
3. Belanja Modal	548,000,000	547,809,278	(190,722)	100	25,000,000	20,612,900	(4,387,100)	83
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR 567364

Tgl Data : 10/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 10/05/24 10:52 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	16,797,301,000	16,259,313,423	(537,987,577)	97	15,769,675,000	13,917,895,842	(1,871,779,158)	88
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

MALANG, 10 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ATEKAN
197210061999031001

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (567364) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
 PERTANIAN JAWA TIMUR

Tgl Data : 10/05/24 6:26 AM
 Tgl Cetak : 10/05/24 10:52 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Perjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	384.978.100	819.022.050	(434.043.890)	(52.995)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	384.978.100	819.022.050	(434.043.890)	(52.995)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	384.978.100	819.022.050	(434.043.890)	(52.995)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6.018.579.858	8.843.827.950	(2.825.248.092)	(31.946)
Beban Persediaan	1.195.170.530	911.491.610	283.678.920	31.122
Beban Barang dan Jasa	5.905.070.870	2.875.344.253	3.029.726.617	105.369
Beban Pemeliharaan	768.058.465	763.149.939	4.908.526	0,643
Beban Perjalanan Dinas	2.128.094.752	696.024.360	1.432.070.392	205.75
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (567364) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN JAWA TIMUR

Tgl Data : 10/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 10/05/24 10:52 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,761,105,235	3,800,635,226	(1,039,529,991)	(27.351)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,291,573)	98,427	(1,390,000)	(1,412.2 14)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	18,774,788,137	17,890,571,765	884,216,372	4.942
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(18,389,809,977)	(17,071,549,715)	(1,318,260,262)	7.722
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	10,305,099	26,510,000	(16,204,901)	(61.128)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10,305,099	26,510,000	(16,204,901)	(61.128)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	324,139,900	125,035,913	199,103,987	159.237
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	324,139,900	125,035,913	199,103,987	159.237
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	334,444,999	151,545,913	182,899,086	120.689
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18,055,364,978)	(16,920,003,802)	(1,135,361,176)	6.71
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(18,055,364,978)	(16,920,003,802)	(1,135,361,176)	6.71

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (567364) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN JAWA TIMUR

Tgl Data : 10/05/24 8:00 AM
Tgl Cetak : 10/05/24 10:52 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	477,386,575,296	481,217,408,201	(3,830,832,905)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18,055,364,978)	(16,920,003,802)	(1,135,361,176)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENURANGI EKUITAS	5,970,000	(4,397,295)	10,367,295	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	111,026,400	(111,026,400)	-
LAIN-LAIN	5,970,000	(115,423,695)	121,393,695	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	15,827,570,164	13,093,568,192	2,734,001,972	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,221,824,814)	(3,830,832,905)	1,609,008,091	-
EKUITAS AKHIR	475,164,750,482	477,386,575,296	(2,221,824,814)	-

Keterangan :
FINAL

MALANG, 10 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ATEKAN
197210061999031001

NERACA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (507304) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
 PERTANIAN JAWA TIMUR

Tgl Data : 10/05/24 0:00 AM
 Tgl Cetak : 10/05/24 10:52 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	51.548,480	64.548,480	(13.000,000)	(20.14)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(5.154,848)	(6.454,848)	1.300,000	(20.14)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	46.393,632	58.093,632	(11.700,000)	(20.14)
Persediaan	26.400,500	30.876,330	(4.475,830)	(14.50)
JUMLAH ASET LANCAR	72.794,132	88.969,962	(16,175,830)	(18.18)
ASET TETAP				
Tanah	445.510.745,332	445.510.745,332	0	0,00
Peralatan dan Mesin	24.240.618,609	24.192.618,609	48.000,000	0,20
Gedung dan Bangunan	38.030.800,278	37.669.774,000	361.026,278	0,96
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.523.256,100	3.523.256,100	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	349.257,083	349.257,083	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(36.584.870,025)	(33.964.626,040)	(2.620.243,985)	7,71
JUMLAH ASET TETAP	475.069,807,377	477.281,025,084	(2,211,217,707)	(0.46)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Jangka Panjang lainnya	7.685,400	0	7.685,400	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(38,427)	0	(38,427)	0,00
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	7.646,973	0	7.646,973	0,00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	7,646,973	0	7,646,973	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2.250,000	2.250,000	0	0,00
Aset Lain-lain	537.473,963	537.473,963	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(525,221,963)	(523,143,713)	(2,078,250)	0,40
JUMLAH ASET LAINNYA	14,502,000	16,580,250	(2,078,250)	(12.53)
JUMLAH ASET	475,164,750,482	477,386,575,296	(2,221,824,814)	(0.47)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	475.164.750,482	477.386.575,296	(2.221.824,814)	(0,47)
JUMLAH EKUITAS	475,164,750,482	477,386,575,296	(2,221,824,814)	(0.47)
JUMLAH EKUITAS	475,164,750,482	477,386,575,296	(2,221,824,814)	(0.47)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	475,164,750,482	477,386,575,296	(2,221,824,814)	(0.47)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugas, BPSIP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- c. pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- d. pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- e. pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- f. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
- b) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
- c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
- d) pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu, sedang pembuatan banyaknya macam ukuran barang yang akan diproduksi merupakan usaha simplifikasi. Standarisasi adalah proses pembentukan standar teknis, yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, prosedur standar (atau praktik), dan lain-lain. Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.

Melihat pentingnya proses standarisasi ini, BPSIP Jawa Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis BSIP memiliki tugas untuk melaksanakan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi di Jawa Timur. Diseminasi atau penyebarluasan hasil penelitian dan pengkajian pertanian kepada pengguna, yang merupakan bagian integral dari kegiatan penelitian dan pengembangan telah banyak dilakukan melalui berbagai kegiatan tergantung sasaran dan hasil penelitian yang didiseminasikan. Standar Instrumen Pertanian yang telah dihasilkan oleh BSIP agar lebih cepat diadopsi oleh petani dan pengguna lainnya serta berkembang di daerah sentra produksi harus didiseminasikan dengan baik. Oleh karena itu, melalui berbagai kegiatan diseminasi standar instrument pertanian yang telah dan akan dilakukan oleh BPSIP Jawa Timur diharapkan akan mempercepat penerapan standar instrumen pertanian di wilayah Jawa Timur sehingga tujuan akhir pembangunan dapat segera terwujud.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- d. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- e. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan

tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Iriqasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	406.091.000	406.091.000
Jumlah Pendapatan	406.091.000	406.091.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.538.416.000	6.113.025.000
Belanja Barang	4.196.763.000	10.136.276.000
Belanja Modal	-	548.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	10.735.179.000	16.797.301.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp431.743.259 atau mencapai 106,32 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp406.091.000. Pendapatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp431.743.259.

Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan pendapatan disebabkan karena pengenaan PP Tarif baru, alokasi pendanaan untuk kegiatan yang berpotensi sebagai penghasil PNBPN mengalami penurunan, tarif penggunaan belum ada, alokasi penggunaan PNBPN pada DIPA 2023 dihapus semua. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	406.091.000	431.743.259	106,3
Jumlah	406.091.000	431.743.259	106,3

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 53,08 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	431.743.25	920.162.56	(53,0
Jumla	431.743.25	920.162.56	(53,08

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2023 sebesar 0,00 dari TA 2022 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp431.743.259 dan Rp920.162.563. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami penurunan sebesar 53,08 dari TA 2022 Penurunan penerimaan pendapatan disebabkan karena pengenaan PP Tarif baru, alokasi pendanaan untuk kegiatan yang berpotensi

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	431.743.259	920.162.563	(53,08)
Jumlah	431.743.259	920.162.563	(53,08)

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	177.363.000	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	10.305.099	26.510.000	(61,13)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.652.360	7.402.350	30,40
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	7.300.000	8.690.000	(16,00)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	190.463.000	309.997.000	(38,56)
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	-	167.009.200	(100,00)
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	-	323.400.000	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	12.540.000	74.630.513	(83,20)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	13.199.800	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.920.000	-	-
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	2.211.000	(100,00)
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	-	312.500	(100,00)
Jumlah	431.743.259	920.162.563	(53,08)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp16.259.313.423 atau 96,80 % dari anggaran belanja sebesar Rp.16.797.301.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp
Belanja Pegawai	6.113.025.000	6.018.579.858	98,46
Belanja Barang	10.136.276.000	9.692.924.287	95,63
Belanja Modal	548.000.000	547.809.278	99,97
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	16.797.301.000	16.259.313.423	96,80

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 16,82% Kenaikan alokasi anggaran belanja untuk kegiatan teknis.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	6.018.579.858	8.843.827.950	(31,95)
Belanja Barang	9.692.924.287	5.053.255.392	91,82
Belanja Modal	547.809.278	20.812.500	2.532,12
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	16.259.313.423	13.917.895.842	16,82

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.018.579.858 dan Rp8.843.827.950. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 31,95 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan Adanya pegawai yang pensiun dan mutasi ke BRIN

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.171.587.900	5.764.621.360	(27,63)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	60.666	75.213	(19,34)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	310.198.930	402.708.800	(22,97)
Belanja Tunj. Anak PNS	94.247.006	115.820.786	(18,63)
Belanja Tunj. Struktural PNS	24.120.000	8.820.000	173,47
Belanja Tunj. Fungsional PNS	382.710.000	1.164.530.000	(67,14)
Belanja Tunj. PPh PNS	18.594.402	87.480.818	(78,74)
Belanja Tunj. Beras PNS	240.289.560	306.119.340	(21,50)
Belanja Uang Makan PNS	610.870.000	748.302.000	(18,37)
Belanja Tunjangan Umum PNS	113.760.000	133.790.000	(14,97)
Belanja Uang Lembur	67.933.000	112.355.000	(39,54)
Jumlah Belanja kotor	6.034.371.464	8.844.623.317	(31,77)
Pengembalian Belanja Pegawai	15.791.606	795.367	1.885,45
Jumlah Belanja	6.018.579.858	8.843.827.950	(31,95)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.692.924.287 dan Rp5.053.255.392. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 91,82% dari realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Kenaikan alokasi anggaran belanja barang

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	2.023.880.324	1.831.891.470	10,48
Belanja Barang Non Operasional	2.837.996.431	693.680.092	309,12
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	966.975.625	795.063.665	21,62
Belanja Jasa	1.043.194.115	349.772.691	198,25
Belanja Pemeliharaan	692.783.040	686.823.114	0,87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.128.094.752	696.024.360	205,75
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	9.692.924.287	5.053.255.392	91,82
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	9.692.924.287	5.053.255.392	91,82

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp547.809.278 dan Rp20.812.500. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 2.532,12% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh Belanja modal untuk pembangunan gate BSIP Jawa Timur dan pengadaan alat laboratorium.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.000.000	20.812.500	130,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.809.278	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	547.809.278	20.812.500	2.532,12
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	547.809.278	20.812.500	2.532,12

B. 2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp20.812.500. Realisasi tersebut pada TA 2023 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh tidak ada belanja modal tanah.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp48.000.000 dan Rp20.812.500, mengalami kenaikan sebesar 130,63 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh Pengadaan alat laboratorium.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.000.00	20.812.50	130,63
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	48.000.00	20.812.50	130,63
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	48.000.00	20.812.50	130,63

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2022. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Pembangunan gate BSIP Jawa Timur.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	499.809.278	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	499.809.278	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	499.809.278	-	-

B.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2022. Belanja Bantuan Sosial tidak ada belanja sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan tidak ada pendapatan perpajakan.

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp384,978,160 dan Rp819.022.050. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 52,63. Sumber PNBPN berasal dari layanan laboratorium tanah, kultur jaringan, pasca panen, UPBS padi, UPBS ternak (Ayam KUB), Kebun Percobaan, Laboratorium Diseminasi.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,	177.363.000	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	9.652.360	7.402.350,00	30,40
Pendapatan Penggunaan Sarana dan	7.300.000	8.690.000,00	(16,00)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi	190.463.000	309.997.000,00	(38,56)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	3.199.800	-	-
Jumlah	384,978,160	819.022.050,00	(52,63)

D.3. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp6.018.579.858 dan Rp8.843.827.950.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 31,95 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Adanya pegawai yang pensiun dan mutasi ke BRIN.

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.171.587.900	5.764.621.360	(27,6)
Beban Pembulatan Gaji PNS	59.060	74.846	(21,0)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	310.198.930	402.708.800	(22,9)
Beban Tunj. Anak PNS	94.247.006	115.820.786	(18,6)
Beban Tunj. Struktural PNS	24.120.000	8.820.000	173,4
Beban Tunj. Fungsional PNS	366.920.000	1.163.735.000	(68,4)
Beban Tunj. PPh PNS	18.594.402	87.480.818	(78,7)
	-	-	-
Jumlah	6.018.579.858	8.843.827.950	(31,9)

D.4. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,195,170,530 dan Rp911.491.610

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 31,71 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh kenaikan alokasi anggaran persediaan .

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	715.563.970	418.545.970	70,96
Beban Persediaan bahan baku	475.125.910	492.825.640	(3,59)
Beban Persediaan Lainnya	9.816.150	120.000	8.080,13
Jumlah Beban Persediaan	1,195,170,530	911.491.610	31,71

D.5. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.905.070.870 dan Rp2.875.344.253.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 105,37 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh adanya kenaikan alokasi anggaran barang dan jasa.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.614.073.324	1.603.388.470	0,67
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	174.492.000	169.204.000	3,13
Beban Barang Operasional Lainnya	235.315.000	46.510.000	405,94
Beban Bahan	2.521.659.300	94.469.500	2.569,28
Beban Barang Non Operasional Lainnya	316.337.131	579.210.592	(45,38)
Beban Langganan Listrik	323.916.715	313.119.724	3,45
Beban Langganan Telepon	10.924.140	12.324.842	(11,36)
Beban Langganan Air	2.601.480	2.802.910	(7,19)
Beban Sewa	173.000.000	-	-
Jumlah	5.905.070.870	2.875.344.253,0	105,37

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp768.058.465 dan Rp763.149.939.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,64 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Beban pemeliharaan tidak banyak mengalami kenaikan dibanding tahun lalu

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	347.912.740	377.459.410	(7,83)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	344.870.300	309.363.704	11,48
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	71.925.925	75.426.825	(4,64)
Beban Persediaan suku cadang	3.349.500	900.000	272,17
	-	-	-
Jumlah	768.058.465	763.149.939	0,64

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.128.094.752 dan Rp696.024.360

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 205,75 persen disebabkan oleh Kenaikan disebabkan adanya kenaikan alokasi anggaran belanja perjalanan dinas.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	1.664.891.252	695.524.360	139,37
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.179.000	500.000	10.935,80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	408.024.500	-	-
	-	-	-
Jumlah	2.128.094.752,0	696.024.360	205,75

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2022.

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.761.105.235 dan Rp3.797.859.566.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	945.807.798	1.447.295.250	(34,65)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.512.660.288	2.048.540.542	(26,16)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	243.282.085	243.282.085	-
Beban Penyusutan Irigasi	56.033.649	56.033.649	-
Beban Penyusutan Jaringan	1.243.165	1.243.165	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap	1.965.750	1.352.375	45,36
Jumlah Penyusutan	2.760.992.7	3.797.747.0	(27,30)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	2.760.992.735	3.797.747.066	(27,30)

D.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-1,291,573 dan Rp98.427

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyisihan Piutang PNB		-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya		(163.313)	(105,16)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	261.740	(100,00)
	-	-	-
Jumlah	(1,291,573)	98.427	(1.107)

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.305.099 dan Rp26.510.000

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	10.305.099	26.510.000,00	(61)
	-	-	-
Jumlah	10.305.099	26.510.000	(61)

D.13. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.14. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp324.139.900 dan Rp125.035.913.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	14.225.400	94.315.913,00	(84,92)
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.920.000	-	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	298.994.500	30.720.000,00	873,29
	-	-	-
Jumlah	324.139.900,0	125.035.913	159,24

D.15. Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pos Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.16. Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.477.386.575.296,00 dan Rp.481.217.408.201,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 18,055,364,978,00 dan Rp.16.917.228.142,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.5.970.000 dan Rp.-115.522.122

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.5.970.000 dan Rp.-115.522.122. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	5.970.000
-	-
Jumlah	5.970.000,0

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.15.827.570.164 dan Rp.12.997.733.279. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.259.313.423
Diterima dari Entitas Lain	(431.743.259)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
-	-
Jumlah	15.827.570.164

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp 16.259.313.423, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 431.743.259

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 475,164,750,482,00 dan Rp.477.182.391.216,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp51,548,480 dan Rp64.548.480. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	51,548,480	64.548.480
	-	-
Jumlah	51,548,480	64.548.480

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5.454.848 dan Rp6.454.848. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	51,548,480	10%	5,154,848
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	51,548,480		5,154,848

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA.

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR.

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp26,400,500 dan Rp30.876.330. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	8,438,275	6.649.205
Bahan untuk Pemeliharaan	5,657,775	16.881.925
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan	11,718,00	
Bahan Baku	280,000	
Persediaan Lainnya	306,450	
Jumlah	26,400,500	30.876.330

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.685.400 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Jangka Panjang lainnya	7.685.400	-
	-	-
Jumlah	7.685.400	-

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing- masing adalah sebesar Rp38.427 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2023 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	7.685.400	1%	38.427
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	7.685.400		38.427
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak	7.685.400		38.427

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp445.510.745.332 dan Rp445.510.745.332.

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp24.240.618.609 dan Rp24.192.618.609. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	24.192.618.609
Mutasi tambah:	
Pembelian	48.000.000
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2023	24.240.618.60
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(23.382.588.583)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	858.030.026

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Pengadaan alat laboratorium senilai Rp. 48.000.000,-
-

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp38.030.800.278 dan Rp37.669.774.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	37.669.774.000
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	205.491.145
Pengembangan Melalui KDP	294.318.133
	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	138.783.000
	-
Saldo per 31 Desember 2023	38.030.800.278
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(10.470.213.988)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	27.560.586.290

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Pembangunan gate BSIP Jawa Timur dengan kontrak Rp. 500.000.000,- dan terealisasi sebesar

- KDP seluruhnya telah menambah aset gedung dan bangunan.

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Koreksi dobel pencatatan

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.3.523.256.100 dan Rp.3.523.256.100. Tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan.

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.349.257.083 dan Rp.349.257.083. Tidak ada mutasi tambah/kurang aset tetap lainnya.

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp35.371.013.871 dan Rp33.964.626.040. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	24.240.618.609	(23.382.588.583)	858.03
2	Gedung dan Bangunan	38.030.800.278	(10.470.213.988)	27.560.58
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.523.256.100	(1.518.211.300)	2.005.04
4	Aset Tetap Lainnya	349.257.083	-	349.25
Akumulasi Penyusutan		66.143.932.070	(35.371.013.871)	30.772.918.199

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp2.250.000 dan Rp2.250.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur berupa Software. Tidak ada mutasi tambah/kurang aset tak berwujud.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2023	2.250.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	2.250.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(6.958.750)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	(4.708.750)

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp537.473.963 dan Rp537.473.963.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	537.473.963
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2023	537.473.963
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	(517.593.588)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	19.880.375

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Tidak ada mutasi tambah aset lain lain

Mutasi Kurang

- Aset lain lain merupakan aset yang dihentikan dari penggunaan dan dalam kondisi rusak berat.
- Telah dilakukan lelang aset peralatan mesin dan sudah terbit risalah lelang dari KPKNL Malang.

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp524.552.338 dan Rp523.143.713. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum.Penyusutan / Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	2.250.000	(6.958.750)	(4.708.750)
Aset Lain-lain	537.473.963	(517.593.588)	19.880.375
-	-	-	-
Total	539.723.963	(524.552.338)	15.171.625

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp475,164,750,482. dan Rp477.386.575.296. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

C.54 Catatan Penting Lainnya neraca

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

KELEBIHAN TUNJANGAN FUNGSIONAL TA. 2023								
BSIP JAWA TIMUR								
No.	Nama	Tunjangan LAMA	Tunjangan BARU	Selisih	Bulan	TA. 2022	TA. 2023	JUMLAH
						Pengbln TYL AKUN 425911	Bel.Tunj.F AKUN 51124	
1	Rika Asnita, S.P, M.Sc	1.750.000	960.000	790.000	4	3.160.000	-	11.060.000
				790.000	10	-	7.900.000	
2	Ratih Kusumasari Ndaru, S.P	1.100.000	960.000	140.000	4	560.000	-	2.100.000
				140.000	11	-	1.540.000	
3	Ali Ari Widodo, S.P, M.P	1.750.000	900.000	850.000	4	3.400.000	-	12.750.000
				850.000	11	-	9.350.000	
4	Ratih Sandarakirana, S.P, M.S	1.750.000	900.000	850.000	4	3.400.000	-	12.750.000
				850.000	11	-	9.350.000	
5	Riza Ulil Fitria, S.P	1.100.000	510.000	590.000	4	2.360.000	-	8.260.000
				590.000	10	-	5.900.000	
JUMLAH		7.450.000	4.230.000					46.920.000

SETORAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN TUNJANGAN FUNGSIONAL TA. 2023									
BSIP JAWA TIMUR									
No.	Nama	JUMLAH	Tgl Setor	AKUN	Jumlah	Sisa	NTPN	NTP	KET
					Yg disetor				
1	Rika Asnita, S.P, M.Sc	3.160.000	05/12/23	425911	3.160.000	-	2B9F61JNFM61AKN	231205432068	Angs ke 1
		7.900.000				7.900.000			
2	Ratih Kusumasari Ndaru, S.P	560.000				560.000			
		1.540.000				1.540.000			
3	Ali Ari Widodo, S.P, M.P	3.400.000	05/12/23	425911	2.000.000	1.400.000	788C18N3EB0A9NLL	000000137609	Angs ke 1
		9.350.000				9.350.000			
4	Ratih Sandarakirana, S.P,	3.400.000	05/12/23	425911	3.400.000	-	597246U8ELRHFDL9	231205364719	Lunas
		9.350.000	05/12/23	511124	9.350.000	-	F813F5UFMUGEP7L4	231205364404	
5	Riza Ulil Fitria, S.P	2.360.000	05/12/23	425911	2.360.000	-	463127QLUGDTS9RO	074726947244	Lunas
		5.900.000	05/12/23	511124	5.900.000	-	F063745KN9BLV7F4	954761717720	
JUMLAH		46.920.000			26.170.000	20.750.000			